

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM MENGATASI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tulus Fasco Alviano Sinaga
NPP. 32.034

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: fascoalviano756@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Irfan Setiawan, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Employment issues, particularly the high unemployment rate, remain a significant challenge for Batam City, a region experiencing rapid population growth and industrial development. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of labor absorption policies implemented by the Batam City Government through the Department of Manpower in addressing such challenges. **Method:** The research employs a qualitative descriptive approach, focusing on Batam City Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning Labor Placement as the core policy. The analysis adopts Merilee S. Grindle's (1980) theory of policy effectiveness, which emphasizes two key aspects: the content of the policy and the context of its implementation. **Result:** The findings indicate that the policy has been relatively effective in improving the competence and placement of local workers. However, challenges remain, particularly the mismatch between job seekers' skills and industry demands, and the limited funding for training programs. Stronger collaboration between the government, industries, and training institutions is necessary to optimize policy implementation and increase local workforce absorption. **Conclusion:** This research is expected to serve as an evaluation tool and provide recommendations for labor policies in Batam City to reduce unemployment and improve community welfare.

Keywords: Policy Effectiveness, Labor Absorption, Unemployment, Batam City.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah ketenagakerjaan, khususnya tingginya angka pengangguran, menjadi tantangan serius yang dihadapi Kota Batam sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang pesat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengatasi tantangan tersebut. **Metode:** melalui Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengatasi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja sebagai kebijakan utama. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980), yang menekankan dua aspek utama, yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini cukup efektif dalam meningkatkan kompetensi dan penempatan tenaga

kerja lokal, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri dan keterbatasan anggaran pelatihan. Diperlukan sinergi yang lebih optimal antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal. **Kesimpulan:** Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan di Kota Batam dalam rangka menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Penyerapan Tenaga Kerja, Pengangguran, Kota Batam.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran, merupakan tantangan krusial dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Batam. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi, Batam menghadapi ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini disebabkan oleh kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja lokal dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batam masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari BPS (2023), TPT Kota Batam mencapai 8,14%, yang merupakan angka signifikan dibandingkan daerah lain. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kota Batam meningkat dari 67,06 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 83,09 ribu jiwa pada tahun 2023, memperlihatkan urgensi penanganan masalah ketenagakerjaan secara komprehensif.

Kebijakan penyerapan tenaga kerja menjadi instrumen penting yang ditempuh Pemerintah Kota Batam untuk merespons tantangan tersebut. Peran strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui program berbasis komunitas seperti OTOP telah terbukti meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan membuka peluang kerja baru (Namoro, 2024). Melalui Dinas Tenaga Kerja, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan, penyuluhan, dan penempatan tenaga kerja yang lebih efektif. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai aspek strategis, seperti pelatihan kerja, monitoring, pembinaan, serta penyediaan informasi pasar kerja yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam konteks efektivitas kebijakan, Merilee S. Grindle (1980) menekankan pentingnya dua komponen utama, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Efektivitas kebijakan pasar tenaga kerja sangat bergantung pada desain program, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan partisipasi aktif dari lembaga pelaksana (Cronert, 2023). Kedua aspek ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan, melibatkan aktor yang relevan, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

Kota Batam memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal, mengingat posisinya yang strategis dan perkembangan industrinya yang dinamis. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, melainkan juga oleh pelaksanaan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota

Batam guna memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai permasalahan ketenagakerjaan telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan tingkat pengangguran dan strategi penyerapan tenaga kerja dalam lingkup nasional maupun daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek makro, seperti pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, atau dinamika globalisasi terhadap pasar tenaga kerja. Minimnya studi yang secara khusus mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah, khususnya Kota Batam, menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu ditelaah lebih lanjut. Hal ini menjadi relevan mengingat dinamika ketenagakerjaan di daerah memerlukan pendekatan kebijakan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.

Kota Batam sebagai wilayah strategis dengan pertumbuhan industri yang pesat menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja lokal dengan kebutuhan dunia industri. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal serta menekan angka pengangguran. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji efektivitas implementasinya berdasarkan indikator teoritis dan praktik kebijakan yang terstruktur. Penelitian ini berupaya menjawab kekosongan tersebut dengan menelusuri sejauh mana kebijakan tersebut mampu berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas serta penempatan tenaga kerja lokal di Kota Batam.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) sebagai kerangka analisis utama. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, melainkan juga oleh konteks implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua aspek penting, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Melalui rumusan masalah yang diajukan, yakni bagaimana efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam serta faktor-faktor yang memengaruhinya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan publik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan ketenagakerjaan telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks daerah dan sektor. Salah satu penelitian dilakukan oleh Nababan dkk. (2023) yang mengkaji implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam merespons ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah kebijakan strategis berbasis regulasi dan inovasi. Namun, studi ini lebih menitikberatkan pada respons kebijakan secara makro dan belum mengulas secara spesifik efektivitas pelaksanaan kebijakan penyerapan tenaga kerja secara operasional di lapangan.

Penelitian lain oleh Putra dkk. (2024) membahas faktor penghambat dan solusi dalam implementasi kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya infrastruktur,

keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Meskipun tidak secara langsung membahas kebijakan penyerapan tenaga kerja, studi ini relevan karena menunjukkan bagaimana tantangan implementatif memengaruhi capaian suatu kebijakan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Latianingsih dkk. (2024) melakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif terhadap peran undang-undang ketenagakerjaan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Fokus kajiannya berada pada wilayah pedesaan dan pariwisata, namun tetap memberikan perspektif penting tentang hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Madjid & Umar (2023) menelaah efektivitas program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kerja yang dirancang berdasarkan kebutuhan dunia usaha dapat secara signifikan menurunkan angka pengangguran di daerah tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya kesesuaian antara program pemerintah dan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan di daerah lainnya.

Sementara itu, Nasution & Thamrin (2016) meneliti implementasi kebijakan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Medan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktor pelaksana, koordinasi kelembagaan, dan keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan konteks penyerapan tenaga kerja, di mana efektivitas kebijakan bergantung pada integrasi antarunit pelaksana dan kejelasan prosedur. Kelima penelitian tersebut secara keseluruhan menjadi landasan penting bagi penyusunan kajian ini, yang secara khusus menilai efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam dengan mengacu pada dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan ilmiah yang penting dalam kajian kebijakan publik, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Kota Batam dipilih sebagai objek kajian karena merupakan wilayah dengan pertumbuhan industri yang tinggi namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal pengangguran dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Kebijakan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yang merupakan regulasi baru dan belum banyak dikaji dalam penelitian ilmiah sebelumnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan evaluatif berbasis teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980).

Teori Grindle menitikberatkan pada dua dimensi utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menilai seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi juga bagaimana kebijakan dijalankan, siapa yang terlibat, dan apa saja faktor yang menghambat atau mendukung implementasinya. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini menganalisis secara sistemik hubungan antara substansi regulasi, kapasitas institusi pelaksana (Dinas Tenaga Kerja), dan tanggapan dari aktor eksternal seperti industri dan pencari kerja.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian oleh Nababan dkk. (2023) lebih menyoroti dampak makro kebijakan pemerintah terhadap pengangguran pasca inflasi, tanpa mendalami aspek teknis implementasi

kebijakan di lapangan. Demikian pula, studi Putra dkk. (2024) meneliti kebijakan pembangunan sektor industri, tetapi tidak secara spesifik membahas kebijakan ketenagakerjaan. Sementara itu, penelitian Madjid & Umar (2023) hanya menilai efektivitas program pelatihan sebagai salah satu intervensi, bukan sebagai bagian dari keseluruhan kerangka kebijakan yang komprehensif. Adapun Nasution & Thamrin (2016) berfokus pada pembinaan sosial terhadap kelompok marginal, yang berbeda konteks dengan penyerapan tenaga kerja sektor formal.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah dari penelitian ini tercermin dalam beberapa aspek: pertama, objek kajian yang spesifik dan aktual berupa Perda Nomor 2 Tahun 2024 di Kota Batam; kedua, pendekatan teoretis yang mendalam menggunakan model Grindle yang belum banyak diterapkan dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah; dan ketiga, cakupan evaluasi yang mencakup substansi kebijakan, proses implementasi, serta dinamika aktor-aktor pelaksana dan penerima manfaat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teori kebijakan publik sekaligus menjadi referensi praktis dalam perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja yang diterapkan Pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, dengan fokus pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan lokal, khususnya dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, melalui analisis berdasarkan teori efektivitas kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yang menekankan pada isi kebijakan dan konteks implementasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif berfokus pada penggambaran secara mendalam terhadap gejala sosial dan hubungan antarvariabel yang sulit diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kebijakan, metode kualitatif sangat relevan karena memungkinkan peneliti menggali proses implementasi dan hambatan yang dihadapi para aktor pelaksana di lapangan” (Simangunsong, 2019). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam, termasuk dinamika sosial, kelembagaan, serta kendala dan keberhasilan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri secara langsung bagaimana kebijakan dijalankan oleh pelaksana, serta bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat sasaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980), yang menilai efektivitas kebijakan berdasarkan dua dimensi utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, serta Kepala Bidang Hubungan Industrial. Pemilihan informan didasarkan pada posisi strategis mereka dalam struktur organisasi dan peran langsung mereka dalam merancang dan melaksanakan kebijakan penempatan tenaga kerja. Selain itu, beberapa pencari kerja lokal juga dijadikan informan untuk memperoleh sudut pandang dari masyarakat yang menjadi sasaran langsung kebijakan tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kota Batam, dengan lokasi utama di Kantor Dinas Tenaga Kerja serta beberapa lokasi pelatihan kerja yang menjadi bagian dari program implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi kebijakan dan program. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas dan keabsahan data yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan fokus pada efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan pedoman penelitian. Dalam penelitian sosial, penggunaan beragam teknik dan pendekatan diperlukan agar hasil yang diperoleh bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurdin & Hartati, 2018). Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan memperluas lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran di Kota Batam. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan dijalankan oleh aktor-aktor pemerintah guna memecahkan masalah publik secara efektif (Hamdi, 2014). Evaluasi berbasis data menunjukkan bahwa program pelatihan yang terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan peluang kerja bagi pemuda di negara berkembang (Kluve *et al.*, 2019). Temuan penelitian disajikan dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3.1. Efektivitas Kebijakan Penyerapan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja, peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980) yang mencakup dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan konteks lingkungan implementasinya. Manajemen pemerintahan daerah menekankan pentingnya tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan partisipatif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Hamid, 2018). Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yang diundangkan pada 23 Februari 2024, dalam pelaksanaannya dinilai telah berjalan cukup baik dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan pencari kerja.

a. Isi Kebijakan

Dalam menilai efektivitas kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam, analisis terhadap isi kebijakan menjadi aspek penting yang pertama. Menurut Merilee S. Grindle, isi kebijakan mencakup elemen-elemen substantif yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri, mulai dari kepentingan yang diakomodasi, manfaat yang diharapkan, program konkret yang dijalankan, hingga sumber daya yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Analisis ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Pertama, dari aspek kepentingan yang memengaruhi, Perda ini dirancang untuk merespons kebutuhan daerah dalam mengurangi angka pengangguran sekaligus melindungi kepentingan tenaga kerja lokal. Kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diakomodasi melalui kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dan menyediakan ruang pelatihan bagi pencari kerja. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pada masyarakat lokal tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha, sehingga terdapat keselarasan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

Kedua, dari aspek manfaat yang dihasilkan, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kota Batam. Selain menurunkan angka pengangguran, kebijakan ini juga memberi manfaat jangka panjang dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan

penyediaan akses informasi lowongan kerja yang lebih transparan dan terintegrasi. Perusahaan juga mendapatkan manfaat berupa tenaga kerja yang lebih siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industrinya.

Ketiga, program yang dihasilkan dari kebijakan ini meliputi fasilitasi pelatihan kerja, bursa kerja, serta penguatan sistem informasi ketenagakerjaan daerah. Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai pelaksana utama dalam menjalankan program tersebut, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja, perusahaan swasta, serta lembaga pendidikan dan pelatihan. Keberadaan program-program ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong implementasi kebijakan secara konkret dan terarah. Program ketenagakerjaan yang dirancang untuk pemuda menunjukkan hasil yang positif ketika disertai pelatihan teknis dan pembinaan lanjutan (Kluve *et al.*, 2019).

Keempat, dari segi sumber daya yang mendukung, kebijakan ini ditopang oleh dukungan anggaran dari APBD, sumber daya manusia dari Dinas Tenaga Kerja, serta regulasi teknis yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Meski terdapat tantangan dalam hal keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan, secara umum sumber daya yang dimiliki masih memadai untuk menjalankan kebijakan ini, terutama dengan adanya kolaborasi antar-stakeholder.

Secara keseluruhan, isi kebijakan penempatan tenaga kerja di Kota Batam sudah dirancang secara komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan, manfaat, dan kebutuhan implementatif. Kejelasan program serta dukungan sumber daya menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki landasan substantif yang kuat dalam mendorong penyerapan tenaga kerja lokal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Desain Kelembagaan

Selain isi kebijakan, dimensi lingkungan juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Dalam perspektif Merilee S. Grindle, lingkungan mencakup kondisi politik, sosial, ekonomi, serta kekuatan institusional yang memengaruhi jalannya kebijakan di lapangan. Pada konteks penelitian ini, dimensi lingkungan dianalisis melalui dua indikator utama: lembaga yang berkuasa dan respon dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Pertama, dari aspek lembaga yang berkuasa, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memegang otoritas utama dalam implementasi kebijakan ini. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan, penyusunan program pelatihan, hingga pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perda. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja juga berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Meskipun memiliki peran dominan, efektivitas lembaga ini masih bergantung pada kapasitas birokrasi dan kesinambungan dukungan politik dari pemerintah daerah.

Kedua, pada indikator respon dari berbagai pihak, pelaksanaan kebijakan ini mendapatkan tanggapan beragam. Pihak swasta atau perusahaan menunjukkan dukungan terhadap Perda ini dengan mulai membuka ruang kerja bagi tenaga lokal dan berpartisipasi dalam pelatihan tenaga kerja. Namun, masih terdapat perusahaan yang kurang optimal dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam regulasi, baik karena kendala teknis maupun kurangnya sosialisasi. Sementara itu, pencari kerja dan masyarakat memberikan respons positif karena adanya kejelasan informasi lowongan dan peningkatan akses terhadap pelatihan kerja. Dukungan dari lembaga pelatihan, media, serta asosiasi industri juga turut memperkuat lingkungan implementatif kebijakan ini.

Secara keseluruhan, dimensi lingkungan dalam implementasi kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam menunjukkan kondisi yang relatif mendukung. Lembaga pelaksana utama memiliki kewenangan formal dan struktur yang memadai, sementara respon dari berbagai aktor eksternal cenderung konstruktif meskipun masih memerlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antarpihak, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Setelah menguraikan isi kebijakan dan konteks lingkungan implementasinya, penting untuk melihat secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Evaluasi tidak hanya berhenti pada apa yang tertulis dalam kebijakan atau bagaimana lingkungan merespons, tetapi juga mencakup unsur-unsur pendukung maupun penghambat yang muncul dalam praktiknya. Hasil meta-analisis menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pasar tenaga kerja aktif sangat bergantung pada konteks lokal dan pelibatan aktor-aktor implementasi (Card *et al.* 2018). Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuannya secara optimal, dan bagaimana hambatan yang ada dapat diatasi melalui perbaikan strategi implementasi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain adalah adanya komitmen kelembagaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memiliki otoritas penuh dan struktur organisasi yang fungsional. Dukungan politik dari pemerintah daerah juga turut memperkuat posisi kebijakan ini, terutama dalam hal penyusunan anggaran, pengesahan regulasi teknis, dan pengawasan pelaksanaan. Selain itu, partisipasi aktif perusahaan yang mulai menerima dan menerapkan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal menjadi penguat efektivitas kebijakan. Program ketenagakerjaan yang melibatkan pelatihan vokasional dan insentif fiskal kepada perusahaan terbukti meningkatkan partisipasi kerja secara berkelanjutan (Brown & Koettl, 2015). Keberadaan sistem informasi ketenagakerjaan yang mulai dikembangkan serta keterlibatan lembaga pelatihan dan pendidikan kerja juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem implementasi yang lebih responsif.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah tenaga pengawas di lapangan, yang menyebabkan pengawasan terhadap implementasi Perda menjadi kurang optimal. Masih terdapat perusahaan yang belum memahami atau tidak melaksanakan ketentuan penempatan tenaga kerja lokal, terutama karena minimnya sosialisasi dan belum adanya sanksi yang tegas. Selain itu, keterbatasan fasilitas pelatihan kerja di beberapa wilayah juga menyulitkan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kerja yang dibutuhkan industri. Kebijakan aktif ketenagakerjaan dapat menjadi beban fiskal jika tidak dirancang dengan efisiensi dan target yang jelas (Brown & Koettl, 2015). Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarlembaga dan sektor swasta, yang mengakibatkan potensi kolaborasi tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja di Kota Batam sangat bergantung pada bagaimana faktor pendukung dapat dimaksimalkan dan hambatan yang ada dapat diminimalkan melalui perbaikan kebijakan, penguatan kapasitas pelaksana, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Penanganan yang tepat terhadap kedua kelompok faktor ini menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari lembaga pelatihan menjadi katalis dalam menciptakan peluang kerja baru (Namoro, 2024).

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja cukup efektif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja lokal. Efektivitas tersebut terlihat dari koordinasi antar-lembaga, pelaksanaan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan akses terhadap informasi lowongan kerja. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Madjid & Umar (2023), yang juga menemukan bahwa pelatihan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan industri mampu menurunkan tingkat pengangguran secara nyata.

Sama halnya dengan penelitian Nasution & Thamrin (2016), yang menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan sosial, penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kota Batam. Namun demikian, objek yang dikaji berbeda. Nasution & Thamrin (2016) lebih fokus pada gelandangan dan pengemis, sedangkan penelitian ini menyasar pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan dunia industri.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Latianingsih dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja merupakan strategi kunci dalam mengurangi pengangguran. Meskipun konteks wilayah penelitian berbeda (yakni di sektor pariwisata pedesaan) kesamaan prinsip dalam pentingnya intervensi pelatihan berbasis kebutuhan lokal tetap tampak. Temuan ini memperkuat urgensi pelibatan multi-pihak dalam membentuk kebijakan yang responsif terhadap kondisi pasar kerja.

Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Putra dkk. (2024) yang mengidentifikasi lemahnya koordinasi dan minimnya pengawasan sebagai kendala utama dalam implementasi kebijakan sektor jasa maritim di Kepulauan Riau. Penelitian ini justru menemukan bahwa koordinasi di Kota Batam tergolong baik, meskipun masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh variasi karakteristik wilayah, kekuatan regulasi, serta dukungan institusional yang lebih kuat di Kota Batam.

Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian Nababan dkk. (2023) yang menekankan analisis kebijakan dari perspektif makro terkait inflasi dan pengangguran, penelitian ini menawarkan pendekatan mikro yang menelaah langsung bagaimana pelaksanaan teknis kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang diskusi ilmiah tentang efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya evaluasi berbasis proses implementasi dan keterlibatan aktor lokal. Temuan ini memperkuat relevansi penggunaan teori Merilee S. Grindle sebagai alat analisis dalam memahami efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah kuatnya dukungan politik dan kelembagaan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mendorong implementasi kebijakan penyerapan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga pelaksana utama menunjukkan peran aktif dalam menyosialisasikan kebijakan, memfasilitasi pelatihan, serta mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan. Stabilitas regulasi dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah juga menjadi faktor yang sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 ini.

Di sisi lain, hambatan utama yang ditemukan adalah masih terbatasnya jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan di lapangan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap implementasi Perda belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam memastikan perusahaan benar-benar mematuhi ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang belum memahami sepenuhnya kewajiban yang diatur dalam regulasi, yang

salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pelibatan pelaku usaha sejak tahap awal penyusunan kebijakan.

Temuan lain yang juga menarik adalah adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan spesifik industri. Meskipun program pelatihan sudah disediakan, masih ada mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pelatihan dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan daya saing dan keterpakaian tenaga kerja lokal. Penyesuaian antara desain program ketenagakerjaan dan permintaan pasar menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan (Cronert, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis permintaan industri.

Dinamika hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga menunjukkan temuan yang patut dicermati. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang memiliki relasi baik dengan pemerintah cenderung lebih responsif dalam melaksanakan kewajiban regulasi. Sementara itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga pendidikan menunjukkan potensi besar dalam memperkuat implementasi kebijakan, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja yang siap pakai. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi salah satu strategi penting dalam efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam memastikan keberhasilan program ekonomi lokal melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor (Namoro, 2024).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 telah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari keberpihakan kebijakan terhadap tenaga kerja lokal, kejelasan program-program yang diimplementasikan, serta dukungan sumber daya yang memadai. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai pelaksana utama menunjukkan peran yang aktif dalam menjalankan regulasi, disertai dukungan dari sektor swasta dan lembaga pelatihan.

Dalam konteks lingkungan implementasi, efektivitas kebijakan didukung oleh kekuatan kelembagaan, respons positif masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang relatif baik. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan pengawasan di lapangan, kurangnya sosialisasi kepada perusahaan, serta belum optimalnya penyesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada dinamika pelaksanaannya.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menekankan pentingnya sinergi multi-aktor dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian evaluasi kebijakan di tingkat daerah, serta merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan kolaborasi, dan penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja guna mencapai efektivitas kebijakan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup instansi yang diteliti, yakni hanya terfokus pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sehingga belum merepresentasikan keterlibatan lintas sektor secara menyeluruh. Selain itu, waktu pelaksanaan yang relatif singkat, yaitu pada 6–25 Januari 2025, membatasi observasi terhadap dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan. Jumlah informan yang terbatas juga menjadi kendala dalam menangkap variasi pandangan yang lebih luas, terutama dari sektor swasta dan masyarakat umum. Di samping itu, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, sehingga hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan relevan hanya dalam kerangka kondisi sosial dan kelembagaan di Kota Batam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak instansi terkait serta memperhatikan perspektif dunia usaha dan masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan secara lebih terukur dan komprehensif. Penelitian longitudinal juga disarankan agar dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam jangka panjang serta dinamika implementasinya seiring perubahan sosial dan ekonomi di daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Batam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Brown, A. J. G., & Koettl, J. (2015). Active labor market programs—Employment gain or fiscal drain? *IZA Journal of Labor Economics*, 4(1), 1–30. <https://doi.org/10.1186/s40172-015-0025-5>
- Card, D., Kluve, J., & Weber, A. (2018). What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations. *Journal of the European Economic Association*, 16(3), 894–931. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvx028>
- Cronert, A. (2023). *Effects and explanations of active labour market policy: Theoretical and empirical challenges for cross-national research*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800880887.00034>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stöterau, J., Weidenkaff, F., & Witte, M. (2019). Do youth employment programs improve labor market outcomes? A quantitative review. *World Development*, 114, 237–253. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.004>
- Latianingsih, N., Purwinarti, T., Syarweny, N., & Firdaus, R. Z. (2024). Efektivitas Kebijakan ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Partisipasi Masyarakat untuk Mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Profesional*. 5(1). <https://doi.org/10.32722/jap.v5i1.6924>
- Madjid, U., & Umar, A. U. (2023). Efektivitas program pelatihan kerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 6(2). <https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1738>
- Nababan, A. Y., Rahmawati, E., Saputra, E. G., Rivanti, F., & Michelle. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian*. 2(2). <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.886>
- Namoro, J. (2024). *Position paper: Enhancing local economic development through the OTOP Philippines Program: The role and responsibilities of LGUs, DTI Regional and*

- Provincial Offices, and the OTOP Management Framework*. Lyceum of the Philippines University. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34867.03366>
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi kebijakan program pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v4i2.415>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Putra, A., Darmawan, E., & Riyadi, S. F. (2024). Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(2). <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.152>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

